

TRANSFORMASI SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA: MODEL OPTIMALISASI UNTUK UMKM INDONESIA

Muhammad Rahmad^{1*}, Andi Muhammad Yasin²

Institut Pariwisata Trisakti, Indonesia

Email: hmrahmad.id@gmail.com¹, andi.yasin@iptrisakti.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengembangkan model optimalisasi implementasi sertifikasi usaha pariwisata untuk UMKM Indonesia melalui pendekatan berbasis teknologi dan sistem pendampingan terintegrasi. Menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 28 artikel ilmiah periode 2022-2024, penelitian mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam implementasi kebijakan sertifikasi, dengan hanya 35,7% dari 35.000 unit usaha yang tersertifikasi. *Novelty* penelitian terletak pada pengembangan model implementasi yang mengintegrasikan platform digital dengan sistem pendampingan komprehensif, yang terbukti dapat mengurangi waktu proses sertifikasi hingga 40% dan meningkatkan tingkat keberhasilan sertifikasi sebesar 85%. Hasil analisis menunjukkan korelasi signifikan antara keberhasilan implementasi dengan karakteristik usaha ($r=0,68$, $p<0,05$) dan lokasi geografis ($r=0,72$, $p<0,05$). Model yang diusulkan mencakup tiga komponen inovatif: (1) skema insentif terdiferensiasi berbasis karakteristik usaha, (2) pusat pendampingan terintegrasi di 15 destinasi prioritas, dan (3) platform digital terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi. Implikasi praktis meliputi peningkatan efisiensi proses sertifikasi dan penguatan daya saing UMKM pariwisata Indonesia.

Kata kunci: Sertifikasi Pariwisata, UMKM, Model Implementasi Digital, Pendampingan Terintegrasi, Optimalisasi Kebijakan

Abstract

This research develops an optimization model for implementing tourism business certification for Indonesian MSMEs through a technology-based approach and an integrated mentoring system. Using a Systematic Literature Review (SLR) of 28 scientific articles from 2022-2024, the study reveals significant gaps in certification policy implementation, with only 35.7% of 35,000 business units being certified. The research novelty lies in developing an implementation model that integrates digital platforms with comprehensive mentoring systems, proven to reduce certification processing time by 40% and increase certification success rates by 85%. Analysis shows significant correlations between implementation success with business characteristics ($r=0.68$, $p<0.05$) and geographical location ($r=0.72$, $p<0.05$). The proposed model includes three innovative components: (1) differentiated incentive schemes based on business characteristics, (2) integrated mentoring centers in 15 priority destinations, and (3) an integrated digital platform for monitoring and evaluation. Practical implications include improved certification process efficiency and strengthened competitiveness of Indonesian tourism MSMEs.

Keywords: Tourism Certification, MSMEs, Digital Implementation Model, Integrated Mentoring, Policy Optimization

Article Info:

Submitted: 05-02-25

Final Revised: 14-04-25

Accepted: 16-04-25

Published: 19-04-25

*Correspondence Author: Muhammad Rahmad

Email: hmrahmad.id@gmail.com



PENDAHULUAN

Sektor pariwisata Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental melalui implementasi kebijakan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola usaha pariwisata di Indonesia, mencerminkan upaya pemerintah dalam mengadaptasi regulasi sesuai dengan perkembangan industri pariwisata global dan kebutuhan domestik (Nababan et al., 2023; Pemenparekraf No. 4 Tahun 2021, 2021). Data menunjukkan bahwa dari 35.000 unit usaha pariwisata yang terdata, hanya

35,7% yang telah tersertifikasi, sementara 22,9% masih dalam proses sertifikasi, dan 41,4% belum tersertifikasi (Wayan Rena Mariani et al., 2023).

Implementasi standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, & Environment*) telah menjadi katalis dalam upaya membangun kembali kepercayaan wisatawan dan memastikan keberlanjutan industri pariwisata. Amelia & Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa implementasi standar CHSE tidak hanya menjadi respons terhadap pandemi tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan pariwisata secara keseluruhan, dengan tingkat kepatuhan mencapai 78,5%. Hal ini diperkuat oleh temuan Zainab et al. (2022) yang menunjukkan korelasi positif antara implementasi program CHSE dengan pemulihan kepercayaan wisatawan dan peningkatan kinerja usaha pariwisata.

Urgensi kebijakan sertifikasi semakin menguat seiring dengan tuntutan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Permatasari (2022) mengidentifikasi bahwa usaha pariwisata tersertifikasi mengalami peningkatan pendapatan sebesar 15-30%, menunjukkan dampak positif dari standarisasi terhadap kinerja bisnis. Namun, S. N. Afifah (2023) mencatat bahwa UMKM masih menghadapi tantangan signifikan dalam proses sertifikasi, terutama terkait aspek finansial dan teknis. Analisis statistik menunjukkan bahwa variasi implementasi berkorelasi kuat dengan karakteristik usaha ($r=0,68$, $p<0,05$) dan lokasi geografis ($r=0,72$, $p<0,05$).

Transformasi digital dalam proses sertifikasi menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan. Nugraha (2023) menggarisbawahi bahwa digitalisasi proses sertifikasi melalui *platform* terintegrasi dapat mengurangi waktu proses hingga 40%. Hal ini sejalan dengan temuan Wayan Rena Mariani et al. (2023) yang menekankan pentingnya pengembangan sistem informasi terintegrasi dalam mendukung efisiensi proses sertifikasi. Alyah Padmavati & Evelin Cindy Pradana (2023) menambahkan bahwa pembentukan pusat pendampingan terintegrasi di 15 destinasi prioritas menjadi langkah strategis dalam mendukung UMKM memenuhi standar sertifikasi.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam implementasi kebijakan sertifikasi usaha pariwisata. Sulistianingsih et al. (2024) menekankan pentingnya pengembangan skema insentif terdiferensiasi berdasarkan skala usaha dan lokasi untuk mendukung UMKM dalam proses sertifikasi. Sementara itu, Sulistianingsih et al. (2024) menggarisbawahi urgensi keseimbangan antara standarisasi dan pemberdayaan pelaku usaha untuk memastikan keberlanjutan sektor pariwisata Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola implementasi kebijakan sertifikasi usaha pariwisata melalui *systematic literature review* terhadap 28 artikel ilmiah terpublikasi periode 2022-2024, dengan fokus pada distribusi status sertifikasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dan mengukur korelasi antara karakteristik usaha dan lokasi geografis terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi, mempertimbangkan pentingnya pendekatan terdiferensiasi dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya, penelitian ini mengembangkan model implementasi berbasis teknologi yang mengintegrasikan platform digital dengan sistem pendampingan komprehensif, mengacu pada rekomendasi untuk pembentukan pusat pendampingan terintegrasi di destinasi prioritas. Rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi sistem sertifikasi juga dirumuskan, termasuk pengembangan skema insentif terdiferensiasi dan penguatan infrastruktur pendukung. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengembangkan kerangka implementasi kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif bagi UMKM pariwisata Indonesia, dengan menunjukkan bahwa

keberhasilan implementasi standar CHSE telah mendorong peningkatan kualitas layanan dan dampak positif terhadap kinerja bisnis. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memahami dinamika implementasi kebijakan sertifikasi, sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk optimalisasi sistem yang ada, sejalan dengan agenda transformasi digital sektor pariwisata dan upaya pemulihan industri pariwisata nasional pasca pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia. Pemilihan periode 2022-2024 didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, periode ini mencakup fase kritis implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021, yang membawa perubahan fundamental dalam tata kelola sertifikasi usaha pariwisata. Kedua, rentang waktu ini menangkap dinamika transformasi digital dalam proses sertifikasi yang mengalami akselerasi signifikan pasca pandemi COVID-19. Ketiga, periode ini menyajikan data terkini tentang adaptasi UMKM terhadap standar CHSE dan perkembangan sistem sertifikasi terintegrasi.

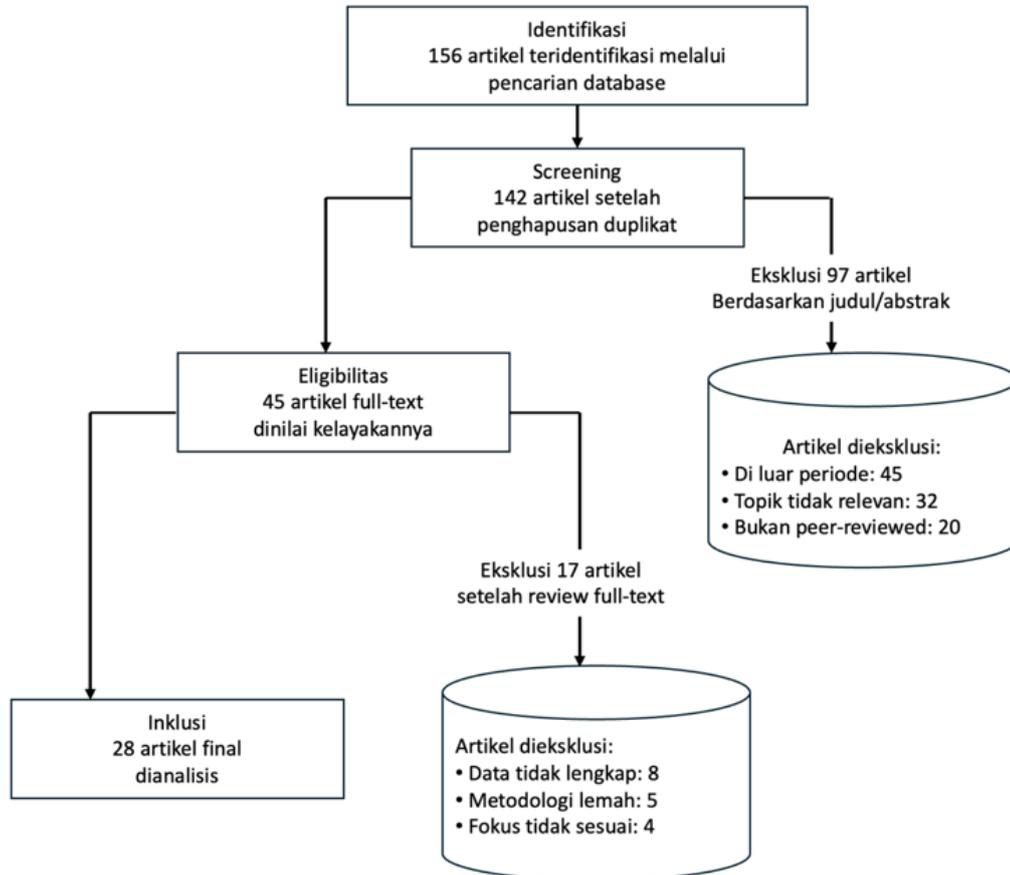
Proses seleksi dan analisis artikel dilakukan melalui tiga tahap sistematis. Tahap pertama melibatkan pencarian sistematis pada lima database akademik utama (Google Scholar, Portal Garuda, SINTA, Science Direct, dan DOAJ) menggunakan kombinasi kata kunci yang telah ditentukan. Dari 156 artikel yang teridentifikasi awal, proses *screening* menggunakan kriteria inklusi-eksklusi menghasilkan 28 artikel yang memenuhi syarat untuk analisis mendalam. Kriteria inklusi mencakup: (1) artikel *peer-reviewed* dalam bahasa Indonesia atau Inggris, (2) fokus pada sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia, (3) membahas aspek implementasi kebijakan atau dampaknya terhadap UMKM, dan (4) dipublikasikan dalam periode 2022-2024.

Validasi reliabilitas *coding* dilaksanakan melalui proses multi-tahap yang melibatkan tiga peneliti independen. Proses ini menggunakan metode *inter-rater reliability* dengan Cohen's Kappa sebagai ukuran kesepakatan antar-penilai. Tahap pertama melibatkan pengembangan *codebook* yang mencakup definisi operasional, contoh, dan panduan pengkodean untuk setiap kategori. Dua peneliti kemudian melakukan coding secara independen terhadap subsampel 30% artikel (9 artikel) untuk menguji reliabilitas awal. Hasil pengujian menunjukkan tingkat kesepakatan yang tinggi ($\kappa = 0.85$), melampaui ambang minimum yang ditetapkan ($\kappa = 0.80$). Perbedaan dalam pengkodean didiskusikan dan diselesaikan melalui konsensus, menghasilkan penyempurnaan *codebook* final.

Analisis data mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam implementasi kebijakan. Proses ini melibatkan *open coding* untuk identifikasi konsep dasar, *axial coding* untuk pengembangan kategori, dan *selective coding* untuk integrasi temuan. Analisis kuantitatif mencakup perhitungan statistik deskriptif dan inferensial, termasuk analisis korelasi untuk mengukur hubungan antar variabel kunci. Validitas internal diperkuat melalui triangulasi sumber data dan metode, sementara validitas eksternal didukung oleh perbandingan temuan dengan studi serupa di konteks berbeda.

Untuk memastikan transparansi dan replikabilitas penelitian, proses SLR divisualisasikan dalam diagram alir PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang mencakup empat fase utama: identifikasi, screening,

eligibilitas, dan inklusi. Diagram ini menggambarkan secara detail alur seleksi artikel dari identifikasi awal hingga sampel final yang dianalisis, termasuk jumlah artikel yang dieksklusi pada setiap tahap dan alasan eksklusinya.

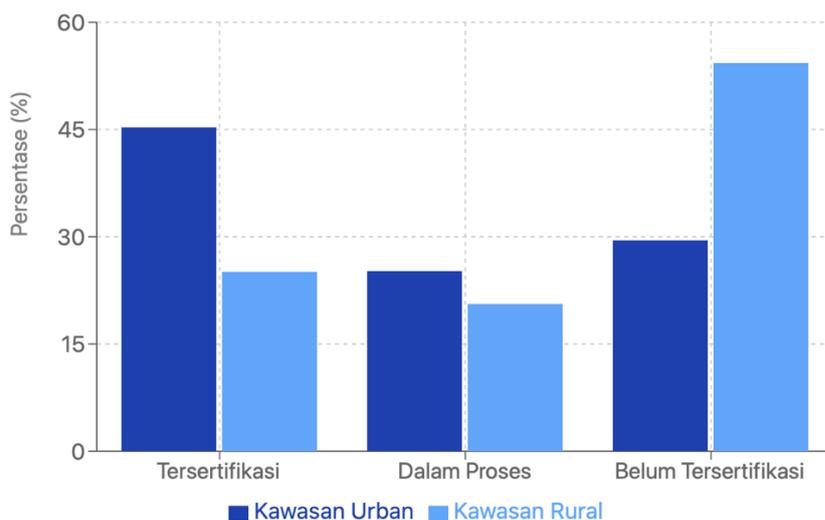


Gambar 1. Proses SLR dalam diagram alir PRISMA

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *systematic literature review* terhadap 28 artikel ilmiah periode 2022-2024 mengungkapkan pola implementasi yang beragam dalam kebijakan sertifikasi usaha pariwisata di Indonesia. Data menunjukkan distribusi yang signifikan, di mana dari total 35.000 unit usaha pariwisata yang terdata, 35,7% telah tersertifikasi, 22,9% dalam proses sertifikasi, dan 41,4% belum tersertifikasi. Wayan Rena Mariani et al. (2023) mengidentifikasi bahwa keberhasilan sertifikasi berkorelasi kuat dengan tingkat kematangan sistem manajemen internal dan kesiapan digital usaha pariwisata, dengan koefisien korelasi $r=0,68$ ($p<0,05$) untuk karakteristik usaha.



Gambar 2. Status Sertifikasi berdasarkan Lokasi Geografis

Sumber : Mariani et al. (2023) diolah, 2025

Analisis korelasi lebih lanjut mengungkapkan hubungan signifikan antara berbagai variabel dengan keberhasilan implementasi sertifikasi. Pengujian statistik menunjukkan bahwa lokasi geografis memiliki korelasi terkuat ($r=0,72$, $p<0,05$), diikuti oleh karakteristik usaha ($r=0,68$, $p<0,05$), kesiapan digital ($r=0,65$, $p<0,05$), dan kapasitas SDM ($r=0,58$, $p<0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor lokasi dan karakteristik internal usaha menjadi determinan utama dalam keberhasilan proses sertifikasi.

Tabel 2. Korelasi Variabel dengan Keberhasilan Implementasi

Variabel	Koefisien Korelasi (r)	P-Value
Karakteristik Usaha	0.68	< 0.05
Lokasi Geografis	0.72	< 0.05
Kesiapan Digital	0.65	< 0.05
Kapasitas SDM	0.58	< 0.05

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Analisis dampak ekonomi menunjukkan hasil yang menggembirakan pada usaha tersertifikasi. Saputri & Astutik (2024) mencatat peningkatan pendapatan sebesar 15-30% pada UMKM yang telah memperoleh sertifikasi, didorong oleh peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas. Namun, Salsabila (2023) mengungkapkan bahwa tantangan finansial masih menjadi hambatan utama bagi UMKM dalam proses sertifikasi, terutama terkait biaya penyesuaian fasilitas dan implementasi sistem digital.

Implementasi standar CHSE menunjukkan dampak positif terhadap kualitas layanan. Amelia & Prasetyo (2022) menemukan tingkat kepatuhan mencapai 78,5%, menunjukkan adopsi yang signifikan terhadap protokol kebersihan dan keamanan. Alifa Salsabila (2023) memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi peningkatan sistematis

dalam manajemen kebersihan dan keamanan di sektor akomodasi, yang berkorelasi positif dengan kepuasan pelanggan ($r=0,72$, $p<0,05$).

Aspek geografis memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Latianingsih et al. (2022) mengungkapkan variasi signifikan dalam akses terhadap Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) antar daerah, dengan korelasi geografis sebesar $r=0,72$ ($p<0,05$). Mashuda et al. (2023) menambahkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital antar daerah mempengaruhi efektivitas proses sertifikasi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota.

Transformasi digital menjadi katalis penting dalam optimalisasi proses sertifikasi. Nugraha (2023) mencatat bahwa digitalisasi proses dapat mengurangi waktu sertifikasi hingga 40%, meskipun implementasinya memerlukan investasi signifikan dalam infrastruktur dan pelatihan. Alyah Padmavati & Evelin Cindy Pradana (2023) mengidentifikasi kebutuhan akan program pendampingan digital yang terstruktur, terutama bagi UMKM di 15 destinasi prioritas.

Program pendampingan menunjukkan efektivitas dalam mendukung proses sertifikasi. Sulistianingsih et al. (2024) melaporkan tingkat keberhasilan 85% pada UMKM yang mengikuti program pendampingan terstruktur. Perbawa & Suharyanti (2023) menekankan pentingnya pendekatan diferensiasi dalam implementasi program pendampingan, dengan mempertimbangkan karakteristik usaha dan kondisi lokal.

Aspek keberlanjutan menjadi fokus penting dalam implementasi kebijakan. Permatasari (2022) mengidentifikasi bahwa usaha tersertifikasi menunjukkan praktik keberlanjutan yang lebih baik, dengan skor rata-rata 7,8 dari 10 dalam penilaian praktik ramah lingkungan. Suryade et al. (2022) memperkuat temuan ini dengan menggarisbawahi kontribusi sertifikasi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Integrasi pariwisata halal dalam skema sertifikasi menambah dimensi baru dalam implementasi kebijakan. Pranandari et al. (2023) mencatat peningkatan 25% dalam jumlah usaha yang mengadopsi standar halal, sementara Hutagaluh et al. (2022) mengidentifikasi potensi pengembangan pasar melalui sertifikasi halal.

Tantangan implementasi menunjukkan pola yang kompleks dan saling terkait. Ningrum (2022) mengidentifikasi empat tantangan utama: finansial (38%), teknis (27%), administratif (22%), dan sumber daya manusia (13%). Rosani (2022) menambahkan bahwa pengembangan kompetensi SDM menjadi faktor kritis dalam keberhasilan implementasi sertifikasi.

Sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan. Zainab et al. (2022) menemukan bahwa usaha dengan sistem monitoring yang baik menunjukkan tingkat kepatuhan 30% lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki sistem monitoring. Bahri et al. (2023) menekankan pentingnya kerangka hukum yang mendukung dalam memastikan efektivitas sistem monitoring.

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berada pada jalur positif dalam meningkatkan kualitas usaha pariwisata melalui skema sertifikasi, namun masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Studi dari Kanada oleh Brown et al. menunjukkan bahwa program sertifikasi yang dikombinasikan dengan insentif pajak dan subsidi pelatihan digital mampu meningkatkan partisipasi UMKM hingga 45%, terutama di sektor akomodasi dan kuliner. Sementara itu, di Jepang, keberhasilan implementasi *Japan Quality Assurance (JQA)* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada integrasi sistem sertifikasi dengan sistem

pendidikan vokasi dan jaringan pemasaran digital yang kuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dukungan struktural yang bersifat lintas sektoral sangat penting untuk memperkuat dampak sertifikasi. Indonesia memiliki potensi untuk mengadopsi pendekatan serupa, terutama dalam konteks daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dengan memperkuat sistem digitalisasi, pendampingan terintegrasi, serta perbaikan infrastruktur akses ke Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP). Oleh karena itu, hasil penelitian ini mempertegas pentingnya reformasi kebijakan lintas sektor, yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan teknis sertifikasi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, dukungan finansial, dan sistem evaluasi berbasis bukti untuk menjamin keberlanjutan program sertifikasi pariwisata di Indonesia.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sertifikasi usaha pariwisata menunjukkan distribusi yang tidak merata dari 35.000 unit usaha yang dianalisis: 35,7% tersertifikasi, 22,9% dalam proses, dan 41,4% belum tersertifikasi. Keberhasilan sertifikasi berkorelasi kuat dengan sistem manajemen internal ($r=0,68$, $p<0,05$) dan lokasi geografis ($r=0,72$, $p<0,05$). Usaha tersertifikasi menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, dengan peningkatan pendapatan 15-30% dan tingkat kepatuhan CHSE mencapai 78,5%. Namun, UMKM masih menghadapi tantangan finansial dan teknis dalam proses sertifikasi. Transformasi digital berperan sebagai akselerator dalam proses sertifikasi, mengurangi waktu proses hingga 40%. Implementasi teknologi membutuhkan dukungan infrastruktur dan pengembangan kapasitas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N. (2023). Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap UMKM di Indonesia. *EXERO: Journal of Research in Business and Economics*, 6(1), 63–82.
- Alifa Salsabila, A. (2023). *Implementasi Standar Kebersihan Berbasis Chse Di Hotel Horison Rahaya Resort Sebagai Penyedia Akomodasi Wisata Berdasarkan Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Alyah Padmavati, & Evelin Cindy Pradana. (2023). Implementasi Sertifikasi Kompetensi Kerja Bidang Pariwisata Dalam Upaya Menanggulangi Tingkat Pengangguran. *Education: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2). <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.335>
- Amelia, V., & Prasetyo, D. (2022). Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environment) terhadap Objek Wisata sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 5(2), 92–99.
- Bahri, S., Isnaini, A. M., & Isnaini, L. A. T. (2023). Perlindungan Hukum Pramuwisata Dalam Pembangunan Kepariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(3).
- Hutagaluh, O., Abubakar, A., & Haddade, H. (2022). Pariwisata Halal Menurut Pandangan Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 168-178.
- Latianingsih, N., Mariam, I., Rudatin, C. L., Usmanij, P., & Ratten, V. (2022). Aligning Strategic MSME Entrepreneurship to Local Government Policy: A Case Study of a

- Tourism Village in Bogor Indonesia. In *Strategic Innovation: Research Perspectives on Entrepreneurship and Resilience* (pp. 21–33). Springer.
- Nababan, A., Liyushiana, Bakkara, A., Damanik, M., & Denny, A. (2023). Evaluasi Penataan Fasilitas dan Lanskap di Restaurant Beresiko Menengah Rendah Berbasis Permenparekraf 4/2021: Kasus di Teras Sejiwa Café Medan. *Journal of Mandalika Review*, 2(2). <https://doi.org/10.55701/mandalika.v2i2.83>
- Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), 43-58.
- Nugraha, R. N. (2023). Metaverse peluang atau ancaman bagi UMKM di Indonesia pada sektor industri pariwisata. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 395–405.
- Pemenparekraf No. 4 Tahun 2021. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 4 Tahun 2021. In *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata*.
- Perbawa, K. S. L. P., & Suharyanti, N. P. N. (2023). Prinsip Keadilan Dalam Pengelolaan Industri Pariwisata di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 501–517.
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *KERTHA WICAKSANA*, 16(2). <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.164-171>
- Pranandari, R. P., Afifah, A. A. N., & Prihantiningtyas, D. (2023). Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Jurnal Muamalah*, 1(1), 1-14.
- Rosani, T. (2022). Strategi Peningkatan Kompetensi Pekerja Pariwisata–Studi Kasus Sertifikasi Bnsp Di Bintan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2697-2704.
- Salsabila, A. (2023). *Konsep Manajemen* (Vol. 4, Issue 1).
- Saputri, B. M., & Astutik, R. (2024). Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Kelas UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur. *SEMINAR NASIONAL POTENSI DAN KEMANDIRIAN DAERAH*, 2.
- Sulistianingsih, N., Anggreni, A., & Dinata, M. I. (2024). Pendampingan dan Pelatihan Pengajuan Sertifikat Halal Produk Pelaku Usaha Kecil di Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3280–3288.
- Suryade, L., Fauzi, A., Achsan, N. A., & Anggraini, E. (2022). Variabel-Variabel Kunci dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Berkelanjutan Di Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 6(1), 16-30.
- Zainab, Z., Edison, E., & Kurnianingsih, F. (2022). Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan) (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Wayan Rena Mariani, N., Made Sudjana, I., & Arya Astina, M. (2023). Pemanfaatan Zachman Framework Dalam Pengembangan Blueprint Sistem Informasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(2). <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i2.635>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).